

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kampanye kepresidenan Joko Widodo diumumkan pada 14 maret 2014, ketika partai politiknya PDI Perjuangan mendeklarasikan Joko Widodo sebagai kandidat dari partai, yang juga didukung oleh partai PKB, Nasdem, dan Hanura serta ditemani Jusuf Kalla sebagai calon Wakil Presiden. Dalam pemaparan visi-misi untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo menggunakan istilah Nawacita ini untuk keperluan politik pada pemilihan umum tahun 2014. Nawacita digunakan sebagai visi-misi apabila terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu tahun 2014-2019. Visi-misi Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla berisi sembilan pokok agenda prioritas untuk melanjutkan semangat perjuangan dari Soekarno yang dikenal sebagai Trisakti yaitu berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan yang disampaikan Dinanti (2014).

Nawacita adalah istilah umum yang diambil dari bahasa sansekerta *nawa* artinya sembilan dan *cita* artinya harapan, keinginan, impian. Nawacita yaitu sembilan harapan, keinginan, impian dari Presiden Joko Widodo untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Menurut Soleman, M. dan Noer, M. (2017, hlm. 34) gagasan Trisakti Bung Karno, diperluas Jokowi sebagai strategi khusus, yakni berdaulat dalam bidang politik 12 program, berdikari dalam ekonomi 16 program dan berkepribadian dalam budaya 3 program, dengan mempertimbangkan konteks kekinian, maka, diprioritaskan 9 (sembilan) program utama atau Nawacita sebagai instrumen langkah-langkah taktis operasional jalan perubahan menuju Indonesia yang lebih besar.

Menurut Hidayat. (2016, hlm. 27) isi gagasan Nawacita adalah pemerataan ekonomi untuk pembangunan infrastruktur sebagai dialektika pembangunan. Hal tersebut selaras dengan pembangunan politik semenjak Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Lewat metode kualitatif dan pendekatan strategi pembangunan politik, serta teori tentang kepentingan nasional, maka, tampak dengan jelas betapa kedaulatan politik melahirkan politik keseimbangan dalam mengatasi masalah buruh dan pengusaha untuk memberikan kepastian perlindungan buruh dan kepastian usaha bagi pengusaha menanamkan investasi modalnya di dalam negeri sehingga menimbulkan sistem ekonomi lebih liberal dan terjadi paradoks

ideologisasi. Maka dari itu diperlukan kemandirian ekonomi serta pembangunan infrastruktur sebagai penghubung antar pulau-pulau di daerah sebagai proses pemerataan pembangunan pusat dan daerah yang Indonesiasentris baik pembangunan fisik maupun pembangunan mental. Kemudian pada kepribadian budaya mengembalikan filosofi dasar atau falsafah dasar kita Pancasila sebagai penuntun jalan pembangunan bangsa dan pembangunan karakter.

Program Nawacita masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang kemudian ditetapkan sebagai Peraturan Presiden No.5 Tahun 2015, didalam RPJMN, Nawacita diwujudkan menjadi strategi yang memiliki tiga dimensi pembangunan, yaitu pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, serta pemerataan dan kewilayahan. Ketiga dimensi ini didukung dengan kondisi yang meliputi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola dan reformasi birokrasi. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Fauzan (2016) strategi ini digantungkanlah harapan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen pada akhir tahun 2019.

Beginilah beberapa bentuk realisasi Nawacita Jokowi-JK selama 4 tahun menurut Bagus (2018) dalam detikcom:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Realisasi: salah satu target normatif dari Nawacita poin satu ini adalah perlindungan terhadap buruh migran RI di luar negeri. Di tahun keempat Jokowi-Jusuf Kalla, ada seorang WNI yang dieksekusi mati, tapi ada pula yang berhasil bebas dari hukuman mati. Pada 18 Maret 2018, TKI asal Bangkalan, Madura, Muhammad Zaini Misrin Arsyad, dieksekusi mati di Arab Saudi. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan sudah berupaya maksimal untuk membebaskan Zaini Misrin. Zaini dituduh membunuh majikannya pada 2004 dan Mahkamah Aamah Mekah memutus vonis mati pada 17 November 2008. Upaya banding yang dilakukan pengacara KBRI tidak mengubah vonis Mahkamah sebelumnya. Zaini tetap divonis mati. Vonis mati terhadap Zaini dinyatakan inkrah pada 2016 hingga dieksekusi pada 2018.

Pada Juli 2018, KBRI Riyadh berhasil membebaskan pasangan suami-istri dari hukuman mati. Suami istri asal Indramayu, Tohirin bin Mustopah Kudus dan Nurnengsih binti

Karsidi Tasdik, yang bekerja di Arab Saudi dituduh melakukan sihir kepada majikannya pada Desember 2015. Melalui empat kali proses banding yang didampingi oleh KBRI Riyadh, pasangan ini akhirnya menghirup udara bebas pada 2016. Awal Oktober 2018, KBRI Riyadh juga membebaskan WNI dari hukuman mati. Jama'ah binti Sarikan Diman asal Kalimantan Barat mulanya divonis mati setelah dituduh melakukan sihir kepada majikannya dan ditangkap pada Februari 2010. Mulanya dia dituntut ganti rugi oleh majikannya sebesar 1.080.000 Riyal atau setara dengan Rp 3,8 Miliar karena anaknya jadi lumpuh. Namun si majikan mengubah tuntutan menjadi *qisas* atau berarti hukuman mati. Jama'ah bebas setelah siding ke-18 pada 12 September 2018.

Sementara itu, menurut catatan *Migrant Care*, ada 178 WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri per Maret 2018. Direktur Eksekutif *Migrant Care* Wahyu Susilo menyebut ada 117 WNI tercatat terancam hukuman mati di Malaysia. Selain soal perlindungan kepada buruh migran, pada poin ini ada target normatif mengenai batas negara. Selama 4 tahun menjabat, pemerintahan Jokowi sedikitnya telah membuat 7 pos lintas batas Negara (PLBN) jadi megah. Ketujuh pos itu adalah PLBN Entikong, Badau, dan Aruk di Kalimantan Barat, kemudian PLBN Motaain, Motamasin, dan Wini di NTT, serta PLBN Skouw di Papua.

Ada pula janji tentang turut menjaga perdamaian dunia. Untuk mencapai target tersebut, Indonesia berjuang agar dipilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Perjuangan itu terjawab kini Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2018-2019, karena hal itu Indonesia bisa lebih aktif berperan dalam menjaga perdamaian dunia. Sepanjang sejarah, Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sebanyak empat kali, yakni pada 1974-1979, 1995-1996, 2007-2008, dan kini untuk periode 2018-2019. Janji berikutnya, masih dalam poin satu ini, adalah soal kesejahteraan prajurit TNI. Menurut data Kantor Staf Presiden (KSP), pemerintah telah membangun rumah untuk prajurit TNI. Sampai 2018, sebanyak 214.441 rumah prajurit dibangun. Sedangkan pada 2015 ada 209.885 rumah. Selain itu, melalui PP 31/2018, tunjangan prajurit veteran juga dinaikkan sebesar 25 persen.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

Realisasi: salah satu target normatif dalam poin kedua adalah mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi demokrasi. Tahun lalu, pemerintah Indonesia menduduki peringkat pertama dalam *Trust and Confidence in National Government* berdasarkan data Gallup yang dirilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam publikasinya yang berjudul *Government at a Glance 2017*. RI bahkan mengalahkan sejumlah Negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, hingga Prancis.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Realisasi: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan tentang pemberian Dana Desa. Dikutip dari hasil situs Kementerian Keuangan, pada 2018 anggaran Dana Desa mencapai Rp 60 Triliun untuk 74.958 desa di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Kemenkeu, sejauh ini Dana Desa telah membuahkan 199.100 kilometer jalan Desa, 1.599 km jembatan, 325.599 unit sambungan air bersih, 4.656 unit embung Desa, 48.271 unit posyandu, 19.794 unit pasar Desa, 43.723 unit PAUD Desa, 343.137 unit sumur dan MCK, serta 299.345 unit drainase dan irigasi untuk periode 2015-2017. Kemenkeu mencatat Dana Desa juga telah mengurangi ketimpangan di Desa dari 0,34 pada 2014 menjadi 0,32 pada 2017.

Sejak awal 2018 juga ada Program Padat Karya Tunai untuk pedesaan. Sebagai permulaan, target program ini adalah 1.000 Desa dari 100 Kabupaten yang memiliki ketimpangan sosial tinggi. Anggaran program ini diambil dari Dana Desa. Untuk 2018, anggaran Padat Karya Tunai mencapai Rp 18 Triliun untuk seluruh Desa di Indonesia.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Realisasi: sederet kepala daerah ditangkap KPK terkait kasus korupsi. KPK tercatat melakukan OTT sebanyak 19 kali selama 2018. Ada 15 kepala daerah yang terjerat. Selain itu, ada 2 anggota DPR, 1 hakim, dan 1 kepala lapas. Eks Menteri Sosial Idrus Marham jadi menteri pertama di kabinet Jokowi yang jadi tersangka KPK. Namun Idrus sudah lebih dulu mundur dari kabinet saat statusnya masih saksi terkait suap PLTU Riau-1. Meski sederet kepala daerah seakan tanpa pandang bulu ditangkap KPK, ada isu lain yang kemudian menjadi sorotan, yakni soal lembaga pemasyarakatan. Hanya berselang beberapa bulan di tahun 2018, kondisi Lapas Sukamiskin yang dihuni para napi kasus korupsi bikin geleng-geleng kepala. Kementerian Hukum dan HAM turut jadi sorotan.

Pada Juli 2018, napi korupsi Fahmi Darmawansyah memberikan suap kepada Kalapas Sukamiskin terdahulu, Wahid Husen. Suap tersebut diduga terkait permintaan penambahan fasilitas di sel. Selain itu, presenter Najwa Shihab melakukan 'sidak' ke sejumlah sel di Sukamiskin, salah satunya yang dihuni eks Ketua Setya Novanto. Pada saat itu, sel Novanto tampak sederhana. Namun, pada September 2018 terungkap sel yang dihuni Novanto jauh lebih mewah. Selain itu soal korupsi. Ada target soal kepastian hukum kepemilikan tanah. Sejauh ini pemerintah gencar menyelesaikan sertifikasi tanah milik warga yang kemudian langsung dibagikan. Adapun isu tentang hak asasi manusia (HAM) baru saja disoroti oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Menurut Kontras, pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla mendapat rapor merah terkait penyelesaian kasus HAM.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

Realisasi: salah satu janji Jokowi-JK dalam poin Nawacita ini adalah program kepemilikan tanah untuk warga dengan total 9 juta hektare dalam 5 tahun. Hingga tahun keempat mereka menjabat, sudah ada 7 juta hektare yang disertifikasi. Selain itu, ada janji untuk membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Program Indonesia Pintar (PIP). Dikutip dari situs Kemendikbud, per Oktober 2018 sudah ada 11.856.201 dari alokasi 17.927.308 KIP yang dibagikan (66,13 persen). Kemudian sebanyak 10.663.653 KIP sudah dicairkan. Sebelumnya, pada 2017, dari alokasi 17.927.308 KIP, bahkan disalurkan hingga 18.248.287. Namun yang dicairkan hanya 15.846.824 KIP.

Sementara itu, menurut survey yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Desember 2017 hingga maret 2018, banyak KIP yang salah sasaran. Survey itu dilakukan di empat wilayah, yakni Kota Medan, Kota Yogyakarta, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Kupang dengan 700 responden. Metode survei itu adalah *simple random sampling* terhadap warga miskin. Temuan survei itu, sebanyak 57,1 persen responden terdaftar dalam Program Indonesia Pintar tapi 19,3 persen mengaku belum memegang KIP secara langsung. Sementara itu, sebanyak 42,9 persen responden yang masuk kategori warga miskin mengaku tak terdaftar dalam PIP.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

Realisasi: Jokowi-JK menargetkan jalan baru sepanjang 2.000 km dalam poin enam Nawacita ini, namun target itu sudah terpenuhi sejak 2017, yakni telah dibangun 2.623 km jalan baru. Pembangunan itu dilakukan secara bertahap sejak 2015. Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, sekitar 2.000 km diantaranya merupakan jalan perbatasan yang dibangun di titik-titik terluar, terpencil, dan terdepan Indonesia. Selain itu Jokowi-JK menargetkan pembangunan 10 pelabuhan baru namun faktanya, ada 27 pelabuhan baru telah dibangun sejak 2015 menurut data Kementerian BUMN.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Realisasi: Jokowi-JK menargetkan pembukaan 1 juta hektare lahan sawah baru di pulau Jawa. Pada tahun 2017, sudah disiapkan 3,2 juta hektar lahan sub-optimal di luar pulau Jawa untuk menjadi sawah. Lahan sub-optimal yang dimaksud adalah rawa, pasang-surut, lahan kering, dan tegalan. Selain pembukaan lahan baru untuk sawah, Jokowi-JK menjanjikan irigasi untuk 3 juta hektar sawah. Salah satu sumber irigasi adalah pembangunan waduk. Selama 4 tahun ini, pemerintah sudah membangun 49 bendungan baru yang tersebar di seluruh Indonesia.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

Realisasi: Jokowi meningkatkan posisi UKP Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila lewat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018. BPIP tak hanya bertugas di ranah pendidikan formal, tetapi juga terkait kebijakan pemerintah. Namun soal BPIP sempat menjadi heboh terkait besaran upah para pejabatnya. Selain itu, Jokowi-JK menjanjikan tentang evaluasi penyelenggaraan Ujian Nasional. Namun dalam UN tahun 2018 terjadi kehebohan gara-gara penerapan soal *Higher Order Thinking Skills* (HOTS). Banyak siswa mengeluhkan tingkat kesulitan soal-soal HOTS.

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.

Realisasi: salah satu janji yang tertuang dalam Nawacita poin sembilan ini ialah menghidupkan forum dialog/musyawarah di masyarakat. Poin ini memang tak tertuang soal pembentukan suatu badan khusus, namun pemerintah Jokowi-JK saat ini masih merampungkan pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN). Wacana mengenai pembentukan DKN juga menuai penolakan lantaran dikhawatirkan lembaga itu bertujuan untuk menyelesaikan kasus HAM masa lalu lewat jalur nonperadilan. Hingga 2018, pembahasan pembentukan DKN hanya sebatas penentuan tugas yang antara lain adalah menghidupkan mekanisme mediasi yang sifatnya pendekatan budaya, tradisi, kerukunan hidup berbangsa.

Dari penjelasan realisasi program Nawacita Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla di atas, apabila di bentuk dalam sebuah table adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Capaian Program Nawacita

Sumber: Diolah Oleh Penulis 2020

No	Poin Nawacita	Realisasi Program	Capaian Program
1	Negara kembali hadir untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.	Perlindungan terhadap buruh migran RI di luar negeri.	Pada 18 Maret 2018, TKI asal Bangkalan, Madura, Muhammad Zaini Misrin Arsyad, dieksekusi mati di Arab Saudi. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan sudah berupaya maksimal untuk membebaskan Zaini Misrin. Zaini dituduh membunuh majikannya pada 2004 dan Mahkamah Aamah Mekah memutus vonis mati pada 17 November 2008. Upaya banding yang dilakukan pengacara KBRI tidak mengubah vonis Mahkamah sebelumnya. Zaini tetap divonis mati. Vonis mati terhadap Zaini dinyatakan inkrah pada 2016 hingga dieksekusi pada 2018.
		Turut menjaga perdamaian dunia.	Indonesia berhasil terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2018-2019, karena hal itu Indonesia bisa lebih aktif berperan dalam menjaga perdamaian dunia. Sepanjang sejarah, Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sebanyak empat kali, yakni pada 1974-1979, 1995-1996, 2007-2008, dan kini untuk periode 2018-2019
		Mengupayakan kesejahteraan prajurit TNI	Menurut data Kantor Staf Presiden (KSP), pemerintah telah membangun rumah untuk prajurit TNI. Sampai 2018, sebanyak 214.441 rumah prajurit dibangun. Sedangkan pada 2015 ada 209.885 rumah. Selain itu, melalui PP 31/2018, tunjangan prajurit veteran juga dinaikkan sebesar 25 persen.
2	Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan	Mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi demokrasi.	Pada tahun 2017 pemerintah Indonesia menduduki peringkat pertama dalam Trust and

	terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi		Confidence in National <i>Government</i> berdasarkan data Gallup yang dirilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam publikasinya yang berjudul <i>Government at a Glance 2017</i> . RI bahkan mengalahkan sejumlah Negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, hingga Prancis.
3	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan tentang pemberian Dana Desa.	Berdasarkan data Kemenkeu, sejauh ini Dana Desa telah membuahkan 199.100 kilometer jalan Desa, 1.599 km jembatan, 325.599 unit sambungan air bersih, 4.656 unit embung Desa, 48.271 unit posyandu, 19.794 unit pasar Desa, 43.723 unit PAUD Desa, 343.137 unit sumur dan MCK, serta 299.345 unit drainase dan irigasi untuk periode 2015-2017. Kemenkeu mencatat Dana Desa juga telah mengurangi ketimpangan di Desa dari 0,34 pada 2014 menjadi 0,32 pada 2017.
		Program Padat Karya Tunai untuk pedesaan.	Target program ini adalah 1.000 Desa dari 100 Kabupaten yang memiliki ketimpangan sosial tinggi. Anggaran program ini diambil dari Dana Desa. Untuk 2018, anggaran Padat Karya Tunai mencapai Rp 18 Triliun untuk seluruh Desa di Indonesia.
4	Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.	Penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya dalam rangka mewujudkan prinsip <i>good government</i> dan <i>clean governance</i>	Berdasarkan data dari KPK tercatat sebanyak 19 kali melakukan OTT selama tahun 2018. Ada 15 kepala daerah, 1 menteri, dan 2 dewan yang terjerat.
5	Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan	Program kepemilikan tanah untuk warga dengan total 9 juta hektare dalam 5 tahun.	Hingga tahun 2018 tercatat sudah ada 7 juta hektare yang disertifikasi.

	dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera"	Membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Progran Indonesia Pintar (PIP).	Dikutip dari situs Kemendikbud, per Oktober 2018 sudah ada 11.856.201 dari alokasi 17.927.308 KIP yang dibagikan (66,13 persen). Kemudian sebanyak 10.663.653 KIP sudah dicairkan. Sebelumnya, pada 2017, dari alokasi 17.927.308 KIP, bahkan disalurkan hingga 18.248.287. Namun yang dicairkan hanya 15.846.824 KIP.
6	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.	Jokowi-JK menargetkan jalan baru sepanjang 2.000 km	Sejak 2017, telah dibangun 2.623 km jalan baru. Pembangunan itu dilakukan secara bertahap sejak 2015. Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, sekitar 2.000 km diantaranya merupakan jalan perbatasan yang dibangun di titik-titik terluar, terpencil, dan terdepan Indonesia.
		Jokowi-JK menargetkan sepuluh pembangunan pelabuhan baru selama satu periode	Berdasarkan data Kementrian PUPR sejak 2015 baru ada 27 pelabuhan baru telah dibangun
7	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.	Jokowi-JK menargetkan pembukaan 1 juta hektare lahan sawah baru di pulau jawa.	Pada tahun 2017, sudah disiapkan 3,2 juta hektar lahan sub-optimal di luar pulau jawa untuk menjadi sawah. Lahan sub-optimal yang dimaksud adalah rawa, pasang-surut, lahan kering, dan tegalan.
		Jokowi-JK menjanjikan irigasi untuk 3 juta hektar sawa.	Salah satu sumber irigasi adalah pembangunan waduk. Selama 4 tahun ini, pemerintah sudah membangun 49 bendungan baru yang tersebar di seluruh Indonesia.
8	Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti	Jokowi meningkatkan posisi UKP Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila lewat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018.	BPIP tak hanya bertugas di ranah pendidikan formal, tetapi juga terkait kebijakan pemerintah. Namun soal BPIP sempat menjadi heboh terkait besaran upah para pejabatnya.

	<p>pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.</p>	<p>Jokowi-JK menjanjikan tentang evaluasi penyelenggaraan Ujian Nasional.</p>	<p>Dalam UN tahun 2018 terjadi kehebohan gara-gara penerapan soal <i>Higher Order Thinking Skills</i> (HOTS). Banyak siswa mengeluhkan tingkat kesulitan soal-soal HOTS.</p>
9	<p>Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.</p>	<p>Menghidupkan forum dialog/musyawarah di masyarakat. Poin ini memang tak tertuang soal pembentukan suatu badan khusus</p>	<p>Poin ini memang tak tertuang soal pembentukan suatu badan khusus, namun pemerintah Jokowi-JK saat ini masih merampungkan pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN). Wacana mengenai pembentukan DKN juga menuai penolakan lantaran dikhawatirkan lembaga itu bertujuan untuk menyelesaikan kasus HAM masa lalu lewat jalur nonperadilan. Hingga 2018, pembahasan pembentukan DKN hanya sebatas penentuan tugas yang antara lain adalah menghidupkan mekanisme mediasi yang sifatnya pendekatan budaya, tradisi, kerukunan hidup berbangsa.</p>

Nawacita Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla meliputi melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan, menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia diwujudkan dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kerja masyarakat Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi domestik, melakukan revolusi karakter bangsa diwujudkan melalui kebijakan

penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan (*civic education*), dan memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Sementara menurut pendapat (Hafidz, 2017, hlm. 211) menyebutkan bahwa:

“Nawacita in the context of its legal regulation is not the most perfect product. It is a work of ordinary man who could have been exploited for the benefit of politics and other agendas. Regardless of that, the Civil State’s Apparatus law means the extent to which the success of bureaucracy reform is successful, and the continuity between the implemented law and the law being merely a “signboard”.

Dari pendapat di atas, dapat kita pahami bagaimana pelaksanaan program Nawacita dalam konteks peraturan hukum bukanlah produk program yang paling sempurna, karena program ini merupakan produksi manusia yang digunakan untuk kepentingan politik dan agenda lainnya. Namun terlepas dari itu, pemerintah telah berupaya mensukseskan reformasi birokrasi dan tujuan pembangunan nasional agar tercapai lebih baik, terkhusus untuk program Nawacita.

Program Nawacita wajib didukung dan direalisasikan juga oleh pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kota/Kabupaten, karena Nawacita merupakan agenda nasional. Pemerintahan daerah dalam menjangkau visi dan misi harus bisa berjalan beriringan dengan program Nawacita demi tercapainya program Nawacita. Kabupaten Cianjur merupakan sebuah Kabupaten yang berada di provinsi Jawa Barat dan tidak terlalu jauh dari Jakarta sebagai Ibu Kota dan pusat pemerintahan Indonesia. Akan tetapi permasalahan di daerah Cianjur begitu kompleks seperti pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cianjur yang masih tertinggal oleh daerah sekelilingnya masih banyaknya jalan yang rusak parah dan berlubang serta banyaknya daerah yang bermula kawasan pertanian berubah menjadi kawasan industri, pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dengan daerah pinggiran yang mengakibatkan timbulnya keinginan masyarakat di daerah Cianjur Selatan yang ingin memisahkan diri dari Kabupaten Cianjur dan ingin membuat otonomi daerah baru. Kemudian ada puluhan karyawan RSUD Cianjur yang belum mendapatkan gaji selama 3 bulan.

Pada akhir tahun 2018 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar yang diduga korupsi dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur dengan barang bukti uang sejumlah Rp 1,556 miliar dan

ditetapkan sebagai terdakwa pada September 2019 dengan hukuman penjara 5 tahun. Dengan itu bagaimana pemerintah Cianjur melaksanakan pembangunan dalam rangka mendukung tujuan pembangunan nasional. Pada dasarnya dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik (*Good Government*) dan benar diperlukan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi Dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif (Wahab, 2002, hlm. 34).

Berdasarkan data BPS Jawa Barat tingkat pengangguran mencapai 8,17% dan Cianjur menjadi peringkat pertama dengan jumlah pengangguran mencapai 10,16%, kemudian tingkat kemiskinan berdasarkan BPS Kabupaten Cianjur mencapai 9,81% atau 35.830 jiwa pada tahun 2018. Pemerintah daerah harus memiliki konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama sebagai suatu konsesus yang dicapai oleh pemerintah, warga Negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam suatu Negara.

Berdasarkan PP RI No. 101 Tahun 2000 pengertian *Good Governance* adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supermasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian *government* identik dengan pengelolaan atau pengurus dengan makna spesifik atau pengurus negara. (Nugroho, 2004, hlm. 207). Artinya dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus sejalan dan selalu berkoordinasi agar tujuan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bisa tercapai dan bisa diterima oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaan dan penerapan program Nawacita di Kabupaten Cianjur, pemerintah daerah wajib mengoptimalkan kinerja lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan serta pemerintah yang baik dapat menjembatani kepentingan yang berbeda demi terbangunnya dan tercapainya tujuan nasional. Lebih lanjut menurut Mardiasmo (1999, hlm. 18) *Good Governance* adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik.

Dengan demikian, menurut pendapat ahli diatas sudah jelas bahwa pembangunan nasional maupun daerah harus didukung oleh pemerintahan yang baik, transparansi terhadap publik, harus bersih dari korupsi agar kemajuan di suatu daerah dan nasional terlaksana dan terealisasi dengan cepat. Kemudian penelitian ini difokuskan terhadap pemerintah daerah untuk mendukung dan bersinergis dengan pemerintah pusat dalam menjalankan program nasional seperti program Nawacita oleh pemerintahan yang bagus (*Good Governance*). Berdasarkan data dan pemikiran di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal yang telah dipaparkan diatas. Karena itu, penulis mengangkat permasalahan ini ke dalam suatu penelitian dengan judul, **IMPLEMENTASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) PROGRAM NAWACITA DALAM MENINGKATKAN *GOOD GOVERNANCE*** (Studi Deskriptif Terhadap Pemerintah Kabupaten Cianjur).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, secara umum rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Program Nawacita Oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur Pada Periode 2014-2019 Dalam Menciptakan *Good Governance*?”

Berdasarkan permasalahan di atas, agar lebih spesifik, maka penulis membatasi masalah tersebut dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program Nawacita oleh pemerintah daerah Kabupaten Cianjur?
2. Bagaimana realisasi program Nawacita untuk masyarakat daerah Kabupaten Cianjur?
3. Bagaimana nilai-nilai program Nawacita dalam meningkatkan *Good Governance* untuk pemerintah daerah Kabupaten Cianjur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka dapat diuraikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan tentang pentingnya implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) program Nawacita dalam meningkatkan *Good Governance* oleh pemerintah daerah Kabupaten Cianjur

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program Nawacita oleh pemerintah daerah Kabupaten Cianjur;
- b. Untuk mengetahui realisasi program Nawacita untuk masyarakat daerah Kabupaten Cianjur;
- c. Untuk mengetahui nilai-nilai program Nawacita dalam meningkatkan *Good Governance* di pemerintah daerah Kabupaten Cianjur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif, yaitu sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menggali dan mengkaji informasi tentang program Nawacita yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) oleh pemerintah daerah Kabupaten Cianjur dalam meningkatkan *Good Governance*.

Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman wawasan kebijakan publik atau administrasi negara dan wawasan politik terhadap mahasiswa yang kelak menjadi pejabat publik untuk menitik beratkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta mampu memberi pemahaman yang lebih kepada peserta didik siswa betapa pentingnya kebijakan pemerintah yang baik untuk masyarakat.

2. Segi Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap beberapa pihak sebagai berikut:

a. Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur

1. Dapat mendeskripsikan pelaksanaan program Nawacita oleh pemerintah daerah Kabupaten Cianjur;
2. Dapat mendeskripsikan realisasi program Nawacita untuk masyarakat daerah Kabupaten Cianjur;
3. Dapat mendeskripsikan nilai-nilai program Nawacita dalam meningkatkan *Good Governance* di pemerintah daerah Kabupaten Cianjur.

b. Pihak Mahasiswa

1. Dapat mengetahui pelaksanaan program Nawacita di Kabupaten Cianjur;

2. Dapat mengetahui dan merasakan realisasi program Nawacita untuk rakyat daerah Kabupaten Cianjur;
 3. Dapat mengetahui dan merasakan nilai-nilai program Nawacita sesuai dengan nilai yang terkandung pada prinsip *good governance* didalam pemerintah daerah Kabupaten Cianjur.
- c. Pihak Masyarakat
1. Dapat merasakan pelaksanaan program Nawacita di daerah Kabupaten Cianjur;
 2. Dapat merasakan realisasi program Nawacita di daerah Kabupaten Cianjur kepada masyarakat secara langsung;
 3. Dapat merasakan nilai-nilai program Nawacita sesuai dengan nilai yang terkandung pada prinsip *good governance* didalam pemerintah daerah Kabupaten Cianjur.

3. Segi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan yang lebih bijak serta mampu memberikan wawasan bahwasanya dalam pembangunan nasional harus didukung dan bersinergis dengan pemerintah daerah untuk menciptakan nilai-nilai yang terkandung dalam *Good Government*.

4. Segi Isu dan Aksi Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

- a. Masyarakat umum, sebagai bahan refleksi dan motivasi untuk berperan aktif dalam upaya meningkatkan *Good Governance* dalam pemerintahan daerah;
- b. Akademisi, praktis pendidikan, organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat, sebagai bahan kontribusi konsep dan paradigma program Nawacita dalam meningkatkan *Good Governance* dengan melibatkan peran aktif warga Negara.

1.5. Struktur Organisasi Tesis

Struktur penulisan tesis yang rencana ditulis terdiri dari 5 Bab, yakni:

Bab I. Menyajikan tentang fakta-fakta dan data-data yang terkait dengan isu atau fenomena yang melatarbelakangi. Pada bab I ini akan diuraikan pendahuluan yang mendeskripsikan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, fokus masalah penelitian,

rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, dan struktur organisasi penulisan tesis.

Bab II. Membahas tinjauan pustaka yang meliputi konsep-konsep, teori-teori yang berkaitan dengan membangun harmonisasi masyarakat melalui budaya sungai. Selain itu, penelitian terdahulu, posisi penelitian, dan kerangka konsep penelitian juga termasuk dalam bab ini.

Bab III. Dalam penelitian ini membahas tentang metode penelitian. Adapun sub bab yang dibahas dalam bab ini mencakup desain penelitian, subjek dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, keabsahan data dan agenda/jadwal penelitian.

Bab IV. Membahas tentang temuan dan pembahasan, yang mencakup gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V. Membahas tentang kesimpulan dan saran. Mencakup kesimpulan umum, kesimpulan khusus, implikasi dan rekomendasi.